

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan anggaran merupakan kebutuhan mendasar dalam menjalankan program di setiap institusi atau unit kegiatan. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Kesuksesan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah dan masyarakat dapat memahami kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah serta memastikan bahwa dana telah dibelanjakan secara ekonomis dan efektif.

Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi, termasuk informasi tentang pendapatan dan belanja aktivitas. Anggaran memberikan gambaran tentang rencana kegiatan untuk periode tertentu, dan perencanaan anggaran yang matang sangat diperlukan untuk menjalankan siklus ini dengan baik. Proses perencanaan anggaran melibatkan penyusunan rencana keuangan untuk pendapatan dan pengeluaran, yang kemudian dialokasikan ke berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai (Nurkholis, 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pengelolaan anggaran dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjadi dasar hukum

bagi otonomi daerah. Otonomi ini memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan dan keuangan wilayahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber anggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran untuk mendukung pembangunan nasional dengan memaksimalkan peran pendapatan dan belanja negara, khususnya dari Kementerian Negara/Lembaga, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Peraturan ini menjadi acuan dalam pertanggungjawaban anggaran negara, termasuk APBD di setiap daerah otonom.

Untuk menilai efisiensi kinerja anggaran, salah satu metode yang dapat digunakan adalah konsep *value for money*. Konsep ini mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan operasionalnya, dengan fokus pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Nordriawan & Hertianti, 2010). Indikator *value for money* terbagi menjadi dua aspek: alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan kualitas pelayanan (efektivitas). Unsur ekonomi mengacu pada hubungan antara pasar dan biaya input, sementara efisiensi diukur dengan membandingkan output dengan input yang digunakan, untuk mencapai hasil dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimal mungkin (Wuwungan et al., 2019). Efektivitas dalam konsep *value for money* adalah kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi

output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif proses kerja organisasi. Tingkat pencapaian program/kegiatan dapat dilihat melalui kinerja keuangan (Dessler, 2017). Menurut (Mardiasmo, 2018), *value for money* sangat penting bagi efektivitas operasional organisasi, termasuk di sektor pelayanan kesehatan. Konsep ini membantu organisasi dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efisien, memastikan nilai optimal dari setiap unit biaya yang dikeluarkan, dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, *value for money* juga membantu organisasi mencapai tujuan dan misi mereka dengan lebih efisien dan efektif.

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik memberikan manfaat ekonomis, efisiensi sumber daya, dan efektivitas dalam mencapai tujuan kinerja keuangan, tercermin dalam progres positif keuangan daerah dalam APBD (Mardiasmo, 2009). Pengukuran kinerja adalah tindakan untuk mengevaluasi pencapaian rencana dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta akuntabilitas organisasi (Faradiba, 2021). *Value for money*, menurut (Mahmudi, 2015), mengatur pengelolaan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam kegiatan, program, dan organisasi, menjadi indikator penting dalam menilai kinerja sektor publik.

Berdasarkan penjelasan dari paragraf sebelumnya, *value for money* dalam kinerja keuangan mengukur efisiensi organisasi dalam menghasilkan hasil sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya finansial

dengan efisien, meningkatkan nilai setiap unit biaya. Transparansi dalam laporan keuangan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan, memastikan sumber daya digunakan secara efektif (Austin, 2005).

Instansi sektor publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memastikan efektivitas dalam mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan. Setiap instansi pemerintah tentu menginginkan tujuan mereka tercapai secara efektif dalam merealisasikan APBD (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, instansi pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kota Kupang merupakan bagian dari pemerintah Kota Kupang yang bertugas membuat laporan keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dinas ini melayani kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dengan mengelola anggaran untuk pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan masyarakat. Namun, Dinas Kesehatan Kota Kupang sering menghadapi hambatan dalam perencanaan anggaran, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta perubahan regulasi yang menyebabkan keterlambatan pengajuan anggaran.

Berikut akan disajikan tabel Program realisasi anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Program Realisasi Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kota Kupang

No	Program	2021			2022			2023		
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Anggaran	Realisasi	Sisa	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Upaya Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Perorangan	Rp41.236.094.259	Rp34.628.661.702	Rp6.607.432.557	Rp42.777.423.359	Rp38.496.984.089	Rp4.280.439.270	Rp86.071.067.768	Rp81.806.197.874	Rp4.210.869.894
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp10.221.572.679	Rp9.371.009.782	Rp850.562.897	Rp7.420.588.500	Rp7.418.998.500	Rp1.590.000	Rp811.575.400	Rp141.660.400	Rp669.915.000
3	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Rp253.342.000	Rp211.342.000	Rp42.000.000	Rp293.371.500	Rp241.153.500	Rp52.218.000	Rp410.433.900	Rp409.822.920	Rp610.980
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp265.171.600	Rp247.223.600	Rp17.948.000	Rp238.624.000	Rp155.475.187	Rp83.148.813	Rp185.670.300	Rp185.647.391	Rp22.909

(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kota Kupang)

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Kupang pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap program. Pada tahun 2021-2023 terdapat program/kegiatan Dinas Kesehatan Kota Kupang yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Seperti pada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2021, dari anggaran sebesar Rp10.221.527.679, terealisasi Rp9.371.009.782, menyisakan Rp850.562.897. Meski ada sisa anggaran, jumlah yang tidak terpakai masih dalam batas wajar, menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk program. Tahun 2022 lebih baik lagi, dengan anggaran Rp7.420.588.500 yang hampir seluruhnya terealisasi yaitu Rp7.418.998.500, hanya menyisakan Rp1.590.000. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun tersebut sangat efektif, dengan anggaran yang digunakan hampir sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan.

Namun pada tahun 2023, dengan anggaran sebesar Rp811.575.400, realisasi hanya mencapai Rp141.660.400, meninggalkan sisa anggaran yang sangat besar, yaitu Rp669.915.000. Penurunan drastis dalam realisasi ini menimbulkan beberapa masalah serius, penurunan tersebut bisa membuat ketidakefisien dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Meskipun anggaran telah berkurang secara signifikan, sisa anggaran yang besar mengindikasikan bahwa banyak dari dana yang dialokasikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan anggaran yang

sudah dialokasikan, sebagai tanda ketidakmampuan manajemen untuk menjalankan program secara efektif. Sisa anggaran yang besar menunjukkan bahwa tujuan program mungkin tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan, yang bisa berdampak negatif pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Analisis *Value For Money* untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Kupang jika dievaluasi dengan analisis *value for money* ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran pada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini :

1. Mengetahui efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dalam pengelolaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Kupang dengan menggunakan analisis *value for money*.

2. Mengetahui faktor-faktor penghambat realisasi anggaran pada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Dinas Kesehatan Kota Kupang

Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan penting kepada Dinas Kesehatan Kota Kupang tentang efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya keuangan dalam program kesehatan masyarakat. Hal ini untuk mengidentifikasi area mana pengeluaran tidak efisien, sehingga Dinas Kesehatan dapat meningkatkan efisiensi alokasi dana.

2. Bagi Akademik

Untuk menambah literatur dan referensi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat mendorong penelitian lanjutan yang mendalami topik terkait, untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan dinas kesehatan di berbagai konteks.